



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT**

Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan OPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat.

Lampung, 5 Mei 2022.

Kepala BKAD Kab. Muna Barat,



ALIMRAN, SE., MM.

Pembina Tk.1, Gol.IV/bb

NIP. 19790907 200502 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Lata Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	39

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar. 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022	7
Tabel. 2.2 Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat	15
Tabel. 2.3 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan	15
Tabel. 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat	18
Tabel. 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2021	19
Tabel. 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021	19
Tabel. 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2022	20
Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Tahun 2022	30
Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Muna Barat	32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat menyusun Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dan mengacu pada RPJMD Perubahan Tahun 2017-2022.

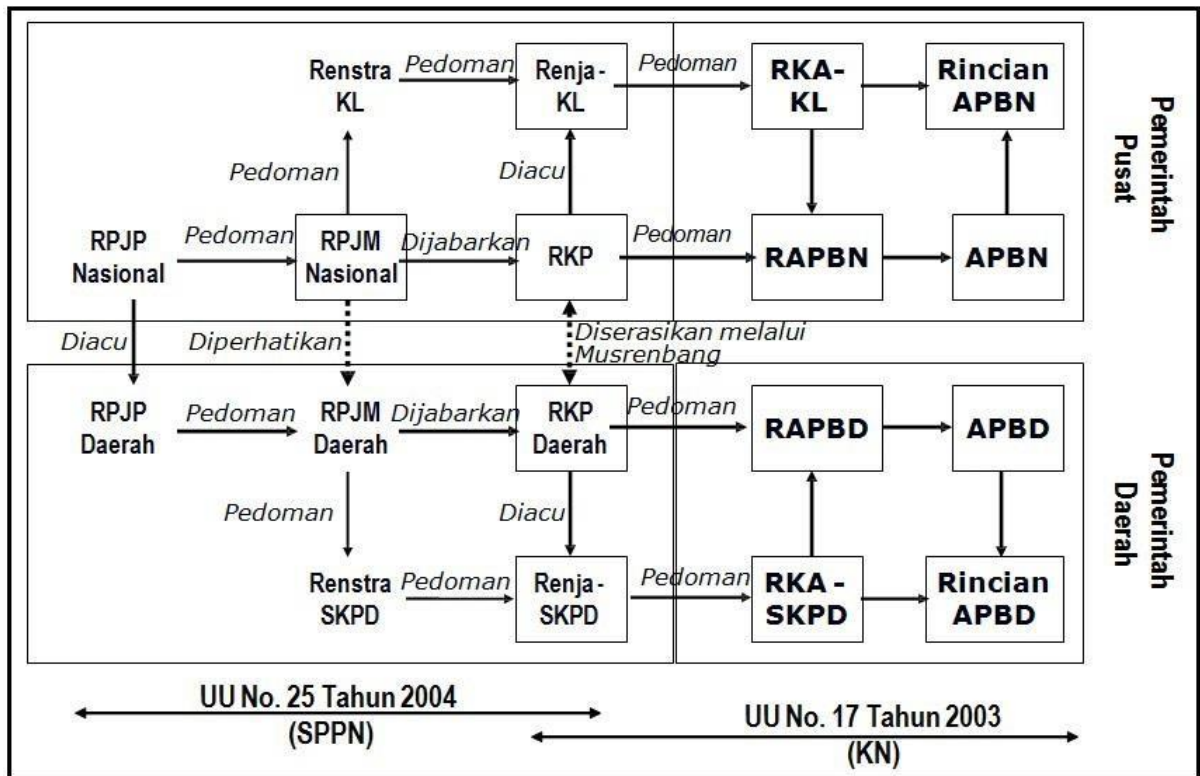
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan awal,
3. Penyusunan rancangan,
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
5. Perumusan rancangan akhir, dan
6. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RPJMD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

RENCANA KERJA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

RENCANA KERJA

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat dalam penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

RENCANA KERJA

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017-2022 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Raelisasi Tahun 2022			Target dan Perkiraan Raelisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)
URUSAN KEUANGAN								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	90	95,73	106,37	90	90	100,00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	100	98	98,00	100	100	100,00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan	100	94,86	94,86	100	100	100,00
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 PNS	24 PNS	100,00	25 PNS	25 PNS	100,00
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan verifikasi bulanan	100	99,44	99,44	100	100	100,00
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Raelisasi Tahun 2022			Target dan Perkiraan Raelisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)
15	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditanggapi	100	97,7	97,70	100	100	100,00
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ketersediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disampaikan tepat waktu	ada	ada	100,00	ada	ada	100,00
17	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ketersediaan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disampaikan tepat waktu	ada	ada	100,00	ada	ada	100,00
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	98,83	98,83	100	100	100,00
19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang memperoleh sertifikat kelulusan Diklat Formal	100	98,92	98,92	100	100	100,00
21	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adnistrasi Umum	100	97,84	97,84	100	100	100,00
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	100	99,51	99,51	100	100	100,00
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Logistik kantor yang dipenuhi	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan yang dipenuhi	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100,00	100	100	100,00
27	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kebutuhan Bahan/material	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 kali	100 kali	100,00	100 kali	100 kali	100,00
30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya BMD SKPD	100	95,27	95,27	100	100	100,00

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Raelisasi Tahun 2022			Target dan Perkiraan Raelisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)
32	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4 dan Roda-2	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	100,00
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pelayanan SKPD	100	90,81	90,81	100	100	100,00
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat yang dipenuhi	100	50,04	50,04	100	100	100,00
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jumlah Kebutuhan Jaringan Internet, Air dan Listrik yang dipenuhi	100	27,89	27,89	100	100	100,00
36	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi	100	99,14	99,14	100	100	100,00
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor Kantor yang dipenuhi	100	97,55	97,55	100	100	100,00
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pemeliharaan BMD SKPD	100	74,24	74,24	100	100	100,00
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaran Dinas Operasional	33 Unit	3 unit	100,00	33 Unit	33 Unit	100,00
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	100 M2	100 M2	100,00	100 M2	100 M2	100,00
41	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Dokumen APBD, Penjabaran APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	100	93,6	93,60	100	100	100,00
42	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rancangan Perda tentang APBD dan perubahannya disampaikan ke DPRD tepat waktu	100	89,32	89,32	100	100	100,00
43	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
44	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
45	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
46	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
47	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Raelisasi Tahun 2022			Target dan Perkiraan Raelisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)
48	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
49	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
50	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
51	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
52	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7 kali	5 kali	100,00	7 kali	7 kali	100,00
53	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	18 kali	15 kali	100,00	18 kali	18 kali	100,00
54	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 kali	4 kali	100,00	5 kali	5 kali	100,00
55	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan	100	80,34	80,34	100	100	100,00
56	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pencairan Tepat waktu	100	99,46	99,46	100	100	100,00
57	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan pengelolaan kas daerah	8 kali	8 kali	100,00	8 kali	8 kali	100,00
58	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Silpa Tahun sebelumnya yang dikelola	100	99,98	99,98	100	100	100,00
59	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diproses, diterbitkan dan didistribusikan	100	99,51	99,51	100	100	100,00
60	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah koordinasi pembiayaan daerah	100	99,88	99,88	100	100	100,00
61	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 kali	7 kali	100,00	7 kali	7 kali	100,00
62	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 kali	5 kali	100,00	5 kali	5 kali	100,00

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Raelisasi Tahun 2022			Target dan Perkiraan Raelisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)
63	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8 kali	8 kali	100,00	8 kali	8 kali	100,00
64	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6 kali	6 kali	100,00	6 kali	6 kali	100,00
65	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melakukan rekon	40 OPD	40 OPD	100,00	44 OPD	44 OPD	100,00
66	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah juknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
67	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan	100	99,52	99,52	100	100	100,00
68	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah disampaikan tepat waktu ke BPK	100	97,52	97,52	100	100	100,00
69	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6 kali	6 kali	100,00	6 kali	6 kali	100,00
70	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 kali	10 kali	100,00	10 kali	10 kali	100,00
71	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	8 kali	8 kali	100,00	8 kali	8 kali	100,00
72	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	10 kali	10 kali	100,00	10 kali	10 kali	100,00

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Raelisasi Tahun 2022			Target dan Perkiraan Raelisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)
73	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 kali	5 kali	100,00	5 kali	5 kali	100,00
74	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah LHP yang di Tanggapi/Tindak Lanjuti	100	99,34	99,34	100	100	100,00
75	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah koordinasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100	95,97	95,97	100	100	100,00
76	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dianalisis	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
77	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen panduan teknis dan kebijakan Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
78	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	ada/tidak ada	ada	ada	100,00	ada	ada	100,00
79	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	87,23	87,23	100	100	100,00
80	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	lancar/tidak lancar penyelenggaraan penunjang urusan keuangan daerah	100	76,62	76,62	100	100	100,00
81	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	ada/tidak ada	ada	ada	100,00	ada	ada	100,00
82	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	100	73,16	73,16	100	100	100,00
83	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang dikelola	100	71,14	71,14	100	100	100,00
84	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pemenuhan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disampaikan tepat waktu	100	93,24	93,24	100	100	100,00
85	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola	100	93,24	93,24	100	100	100,00
86	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
87	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Raelisasi Tahun 2022			Target dan Perkiraan Raelisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)
88	Penyusunan Perencanaan Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang direncanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
89	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
90	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah	100	99,55	99,55	100	100	100,00
91	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah	100	95,02	95,02	100	100	100,00
92	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diamankan	100	98,95	98,95	100	100	100,00
93	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dinilai	100	95,08	95,08	100	100	100,00
94	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diawasi dan dikendalikan	100	95,79	95,79	100	100	100,00
95	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dioptimalkan Penggunaan dan Pemanfaatannya	100	98,17	98,17	100	100	100,00
96	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	6 kali	5 kali	100,00	6 kali	6 kali	100,00
97	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
98	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dan dikelola	100	97,69	97,69	100	100	100,00
99	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah	97,5	97,58	100,08	97,5	97,5	100,00
100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD	100	97,58	97,58	100	100	100,00
101	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Pajak Daerah yang direncanakan	100	95,47	95,47	100	100	100,00
102	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah yang disusun, dianalisis dan dikembangkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
103	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang disebarluaskan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
104	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang didata dan didaftarkan	100	98,38	98,38	100	100	100,00
105	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Basis Data Pajak Daerah yang dikelola, dipelihara dan dilaporkan	100	99,36	99,36	100	100	100,00

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Raelisasi Tahun 2022			Target dan Perkiraan Raelisasi Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)
106	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai	100	98,46	98,46	100	100	100,00
107	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	100	99,08	99,08	100	100	100,00
108	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Konsultasi Pajak Daerah	100	99,66	99,66	100	100	100,00
109	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi	100	98,8	98,80	100	100	100,00
110	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang ditagih	100	98,94	98,94	100	100	100,00
111	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	100	99,22	99,22	100	100	100,00
112	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang dikendalikan, diperiksa dan diawasi	100	97,69	97,69	100	100	100,00
113	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola, dibina dan diawasi	100	99,07	99,07	100	100	100,00

RENCANA KERJA

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Penghambat
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Ketidak tercapaian target pada indikator justru menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan</i>

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut :

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Keberhasilan
URUSAN KEUANGAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
15	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
17	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
21	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Keberhasilan
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
27	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
32	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
35	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
40	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
41	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
42	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
43	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
44	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
45	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
46	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
47	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
48	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
49	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
50	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
51	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
52	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
53	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
54	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
55	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
56	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
57	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
58	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
59	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
60	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
61	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
62	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
63	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
64	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Keberhasilan
65	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
66	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
67	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
68	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
69	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
70	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
71	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
72	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
73	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
74	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
75	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
76	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
77	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
78	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
79	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
80	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
81	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
82	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
83	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
84	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
85	Penyusunan Standar Harga	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
86	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
87	Penyusunan Perencanaan Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
88	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
89	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
90	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
91	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
92	Penilaian Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
93	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
94	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
95	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
96	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
97	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
98	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
99	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
100	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
101	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
102	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
103	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran

RENCANA KERJA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Keberhasilan
104	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
105	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
106	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
107	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
108	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
109	Penagihan Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
110	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
111	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran
112	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersedianya anggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Secara rinci, capaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja						Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Opini Pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 supaya IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut ?:

1. Mempertahankan opini WTP,
2. Peningkatan Pengelolaan BMD
3. Penyerapan belanja sesuai dengan anggaran kas.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset

RENCANA KERJA

Daerah Kabupaten Muna Barat menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Permasalahan	Hambatan
1. Terbatasnya jumlah SDM	Jumlah penerimaan PNS yang terbatas
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai	Kemampuan keuangan daerah yang terbatas
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan yang terintegritas	Kesiapan aplikasi dan kualitas SDM

Selain itu, selama Tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Muna Barat melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Kurangnya komitmen kepala PD/Unit Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib
2. Pengelolaan BMD semakin membaik	Rendahnya kesadaran pengguna BMD terkait pemeliharannya

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi;
2. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan;
3. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset;
5. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Peningkatan kualitas SDM;
7. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional;

RENCANA KERJA

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: **Badan Keuangan dan Aset Daerah**

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KEUANGAN			117,375,063,635	KEUANGAN			117,375,063,635
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			117,375,063,635	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			117,375,063,635
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	90	16,269,756,735	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	90	16,269,756,735
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	85	146,800,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	85	146,800,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	24,800,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	24,800,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000

RENCANA KERJA

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	20,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	22,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	22,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dievaluasi	1 Dokumen	20,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dievaluasi	1 Dokumen	20,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan	100	12,816,570,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan	100	12,816,570,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 PNS	12,500,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 PNS	12,500,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan verifikasi bulanan	100	172,800,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan verifikasi bulanan	100	172,800,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	34,590,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan	1 Dokumen	34,590,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	34,590,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	34,590,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	persentase hasil pemeriksaan yang ditanggapi	100	20,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	persentase hasil pemeriksaan yang ditanggapi	100	20,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ketersediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disampaikan tepat waktu	ada	34,590,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ketersediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disampaikan tepat waktu	ada	34,590,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ketersediaan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disampaikan tepat waktu	ada	20,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ketersediaan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disampaikan tepat waktu	ada	20,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	210,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	210,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	50,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	50,000,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang memperoleh sertifikat kelulusan Diklat Formal	100	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang memperoleh sertifikat kelulusan Diklat Formal	100	150,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Admistrasi Umum	100	1,806,474,735	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Admistrasi Umum	100	1,806,474,735

RENCANA KERJA

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	100	24,999,875	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	100	24,999,875
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi	1 Paket	329,690,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi	1 Paket	329,690,500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang dipenuhi	1 Paket	39,955,350	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang dipenuhi	1 Paket	39,955,350
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Logistik kantor yang dipenuhi	1 Paket	249,996,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Logistik kantor yang dipenuhi	1 Paket	249,996,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan yang dipenuhi	1 Paket	152,279,850	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan yang dipenuhi	1 Paket	152,279,850
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	20,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	20,000,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kebutuhan Bahan/material	1 Paket	289,999,160	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kebutuhan Bahan/material	1 Paket	289,999,160
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	50,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	50,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 kali	649,554,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 kali	649,554,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pelayanan SKPD	100	1,224,912,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pelayanan SKPD	100	1,224,912,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat yang dipenuhi	100	7,992,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat yang dipenuhi	100	7,992,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jumlah Kebutuhan Jaringan Internet, Air dan Listrik yang dipenuhi	100	166,920,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jumlah Kebutuhan Jaringan Internet, Air dan Listrik yang dipenuhi	100	166,920,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi	100	15,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi	100	15,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor Kantor yang dipenuhi	100	1,035,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor Kantor yang dipenuhi	100	1,035,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pemeliharaan BMD SKPD	100	65,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pemeliharaan BMD SKPD	100	65,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaran Dinas Operasional	33 Unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaran Dinas Operasional	33 Unit	20,000,000

RENCANA KERJA

RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	100 M2	45,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	100 M2	45,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Dokumen APBD, Penjabaran APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	100	99,838,954,900	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Dokumen APBD, Penjabaran APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	100	99,838,954,900
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rancangan Perda tentang APBD dan perubahannya disampaikan ke DPRD tepat waktu	100	1,272,023,000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rancangan Perda tentang APBD dan perubahannya disampaikan ke DPRD tepat waktu	100	1,272,023,000
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	149,020,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	149,020,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	149,020,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	149,020,000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	27,960,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	27,960,000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	19,980,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	19,980,000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	19,980,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	19,980,000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	19,980,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	19,980,000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	474,867,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	474,867,000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	199,870,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	199,870,000
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	49,114,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	49,114,000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7 kali	49,114,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7 kali	49,114,000

RENCANA KERJA

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	18 kali	69,072,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	18 kali	69,072,000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 kali	24,046,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 kali	24,046,000
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan	100	20,000,000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan	100	20,000,000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pencairan Tepat waktu	100	596,990,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pencairan Tepat waktu	100	596,990,000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan pengelolaan kas daerah	8 kali	64,876,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan pengelolaan kas daerah	8 kali	64,876,000
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Silpa Tahun sebelumnya yang dikelola	100	39,976,000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Silpa Tahun sebelumnya yang dikelola	100	39,976,000
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diproses, diterbitkan dan didistribusikan	100	95,970,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diproses, diterbitkan dan didistribusikan	100	95,970,000
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah koordinasi pembiayaan daerah	100	69,986,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah koordinasi pembiayaan daerah	100	69,986,000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 kali	59,658,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 kali	59,658,000
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 kali	44,004,000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 kali	44,004,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8 kali	74,856,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8 kali	74,856,000

RENCANA KERJA

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	6 kali	44,004,000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	6 kali	44,004,000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melakukan rekon	40 OPD	38,860,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melakukan rekon	40 OPD	38,860,000
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah juknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	1 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah juknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	1 Dokumen	30,000,000
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan	100	34,800,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan	100	34,800,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah disampaikan tepat waktu ke BPK	100	1,172,912,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah disampaikan tepat waktu ke BPK	100	1,172,912,000
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6 kali	107,501,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6 kali	107,501,000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 kali	126,109,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 kali	126,109,000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	8 kali	76,442,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	8 kali	76,442,000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	10 kali	49,222,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	10 kali	49,222,000

RENCANA KERJA

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 kali	269,593,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 kali	269,593,000
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah LHP yang di Tanggapi/Tindak Lanjuti	100	30,000,000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah LHP yang di Tanggapi/Tindak Lanjuti	100	30,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah koordinasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100	39,808,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah koordinasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100	39,808,000
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dianalisis	1 Dokumen	339,591,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dianalisis	1 Dokumen	339,591,000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen panduan teknis dan kebijakan Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen panduan teknis dan kebijakan Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	30,000,000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	ada/tidak ada	ada	34,800,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	ada/tidak ada	ada	34,800,000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	35,364,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	35,364,000
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah koordinasi Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	100	34,482,000	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah koordinasi Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	100	34,482,000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	lancar/tidak lancar penyelenggaraan penunjang urusan keuangan daerah	100	96,797,029,900	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	lancar/tidak lancar penyelenggaraan penunjang urusan keuangan daerah	100	96,797,029,900
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	ada/tidak ada	ada	90,263,029,900	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	ada/tidak ada	ada	90,263,029,900
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	100	6,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	100	6,000,000,000

RENCANA KERJA

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang dikelola	100	534,000,000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang dikelola	100	534,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan Barang Milik Daerah yang disampaikan tepat waktu	100	668,598,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan Barang Milik Daerah yang disampaikan tepat waktu	100	668,598,000
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola	100	668,598,000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola	100	668,598,000
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	89,552,000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	89,552,000
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	20,000,000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang direncanakan	1 Dokumen	18,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang direncanakan	1 Dokumen	18,000,000
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	20,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah	100	49,222,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah	100	49,222,000
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah	100	229,902,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah	100	229,902,000
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diamankan	100	47,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diamankan	100	47,000,000
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dinilai	100	19,950,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dinilai	100	19,950,000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diawasi dan dikendalikan	100	30,000,000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diawasi dan dikendalikan	100	30,000,000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dioptimalkan Penggunaan dan Pemanfaatannya	100	30,000,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dioptimalkan Penggunaan dan Pemanfaatannya	100	30,000,000
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	6 kali	50,000,000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	6 kali	50,000,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	30,000,000
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dan dikelola	100	34,972,000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dan dikelola	100	34,972,000

RENCANA KERJA

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah	97.5	597,754,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah	97.5	597,754,000
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD	100	597,754,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD	100	597,754,000
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Pajak Daerah yang direncanakan	100	27,200,000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Pajak Daerah yang direncanakan	100	27,200,000
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah yang disusun, dianalisis dan dikembangkan	1 Dokumen	22,000,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah yang disusun, dianalisis dan dikembangkan	1 Dokumen	22,000,000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang disebarluaskan	1 Dokumen	38,400,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang disebarluaskan	1 Dokumen	38,400,000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang didata dan didaftarkan	100	16,450,000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang didata dan didaftarkan	100	16,450,000
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Basis Data Pajak Daerah yang dikelola, dipelihara dan dilaporkan	100	16,450,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Basis Data Pajak Daerah yang dikelola, dipelihara dan dilaporkan	100	16,450,000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai	100	174,552,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai	100	174,552,000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	100	16,450,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	100	16,450,000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Konsultasi Pajak Daerah	100	149,602,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Konsultasi Pajak Daerah	100	149,602,000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi	100	16,450,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi	100	16,450,000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang ditagih	100	44,000,000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang ditagih	100	44,000,000
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	100	22,000,000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	100	22,000,000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang dikendalikan, diperiksa dan diawasi	100	27,000,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang dikendalikan, diperiksa dan diawasi	100	27,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola, dibina dan diawasi	100	27,200,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola, dibina dan diawasi	100	27,200,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2022, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", untuk mencapai sasaran tersebut, transformasi ekonomi pada 2022 harus dilaksanakan secara inklusif dan terpadu, salah satunya dengan meningkatkan daya beli dan usaha. Selain itu, transformasi ekonomi juga didukung dengan diversifikasi ekonomi yang dilakukan dengan peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur, serta kualitas layanan digital.

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2022, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1 : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- PN 3 : SDM berkualitas dan berdaya saing
- PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7 : Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2022, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan Visi dan Misi RPJMD-P Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra BKAD Tahun 2017-2022, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja BKAD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	
					Semula	Penyesuaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini WTP	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
				Persentase OPD Yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP	100	100
			Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tertib	Persentase OPD Yang Mengelola BMD Dengan Baik	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Muna Barat

Nama Perangkat Daerah : **Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat**

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	Target Kinerja	Target Capaian Kinerja APBD TA. 2022 PerKegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja	Perkiraan Maju TA. 2023 PerKegiatan/ SubKegiatan
KEUANGAN								111.498.272.990		367.548.274.467
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								111.498.272.990		367.548.274.467
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	90%	14.640.455.490	90%	16.104.501.039
X	XX	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B	146.800.000	B	161.480.000
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.800.000	2 Dokumen	27.280.000
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000
X	XX	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	24.200.000
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000
X	XX	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kategori Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	11.308.178.000	100%	12.438.995.800
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	11.000.000.000	26 Orang/ Bulan	12.100.000.000

RENCANA KERJA

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	Target Kinerja	Target Capaian Kinerja APBD TA. 2022 PerKegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja	Perkiraan Maju TA. 2023 PerKegiatan/ SubKegiatan
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	172.800.000	1 Dokumen	190.080.000
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	34.590.000	1 Dokumen	38.049.000
X	XX	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	34.590.000	1 Laporan	38.049.000
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000
X	XX	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	26.198.000	1 Laporan	28.817.800
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000
X	XX	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	266.338.000	100%	292.971.800
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	206.338.000	6 Orang	226.971.800
X	XX	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Admistrasi Umum	100%	1.629.227.490	100%	1.792.150.239
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.999.875	1 Paket	27.499.863
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	312.750.500	1 Paket	344.025.550
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.955.350	1 Paket	43.950.885
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	249.996.000	1 Paket	274.995.600
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	152.279.850	1 Paket	167.507.835
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000

RENCANA KERJA

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	Target Kinerja	Target Capaian Kinerja APBD TA. 2022 PerKegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja	Perkiraan Maju TA. 2023 PerKegiatan/ SubKegiatan
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	266.009.915	1 Paket	292.610.907
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	513.236.000	1 Laporan	564.559.600
X	XX	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pelayanan SKPD	100%	1.224.912.000	100%	1.347.403.200
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.992.000	1 Laporan	8.791.200
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	166.920.000	1 Laporan	183.612.000
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.500.000
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.035.000.000	1 Laporan	1.138.500.000
X	XX	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pemeliharaan BMD SKPD	100%	65.000.000	100%	71.500.000
X	XX	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	20.000.000	33 Unit	22.000.000
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	1 Unit	49.500.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan/ Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan akuntabel disampaikan tepat waktu	100%	96.043.689.500	100%	105.648.058.450
5	02	02	1,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rancangan Perda tentang APBD dan perubahannya disampaikan ke DPRD tepat waktu	100%	1.272.023.000	100%	1.399.225.300
5	02	02	1,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	149.020.000	1 Dokumen	163.922.000
5	02	02	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	149.020.000	1 Dokumen	163.922.000
5	02	02	1,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	27.960.000	44 Dokumen	30.756.000
5	02	02	1,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	19.980.000	44 Dokumen	21.978.000
5	02	02	1,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	19.980.000	44 Dokumen	21.978.000

RENCANA KERJA

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	Target Kinerja	Target Capaian Kinerja APBD TA. 2022 PerKegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja	Perkiraan Maju TA. 2023 PerKegiatan/ SubKegiatan
5	02	02	1,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	19.980.000	44 Dokumen	21.978.000
5	02	02	1,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	474.867.000	2 Dokumen	522.353.700
5	02	02	1,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	199.870.000	2 Dokumen	219.857.000
5	02	02	1,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	49.114.000	1 Dokumen	54.025.400
5	02	02	1,01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	49.114.000	1 Dokumen	54.025.400
5	02	02	1,01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	69.072.000	1 Dokumen	75.979.200
5	02	02	1,01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	24.046.000	1 Dokumen	26.450.600
5	02	02	1,01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	20.000.000	44 Orang	22.000.000
5	02	02	1,03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pencairan Tepat Waktu	100%	596.990.000	100%	656.689.000
5	02	02	1,03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	64.876.000	1 Dokumen	71.363.600
5	02	02	1,03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	39.976.000	1 Laporan	43.973.600
5	02	02	1,03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	95.970.000	1 Dokumen	105.567.000
5	02	02	1,03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	69.986.000	1 Dokumen	76.984.600
5	02	02	1,03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	59.658.000	1 Dokumen	65.623.800
5	02	02	1,03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	44.004.000	1 Dokumen	48.404.400

RENCANA KERJA

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	Target Kinerja	Target Capaian Kinerja APBD TA. 2022 PerKegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja	Perkiraan Maju TA. 2023 PerKegiatan/ SubKegiatan
5	02	02	1,03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	74.856.000	1 Laporan	82.341.600
5	02	02	1,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	44.004.000	1 Dokumen	48.404.400
5	02	02	1,03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	38.860.000	1 Dokumen	42.746.000
5	02	02	1,03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000
5	02	02	1,03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	34.800.000	44 Orang	38.280.000
5	02	02	1,04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah disampaikan tepat waktu ke BPK	100%	1.082.092.000	100%	1.190.301.200
5	02	02	1,04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	107.501.000	1 Laporan	118.251.100
5	02	02	1,04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	126.109.000	1 Dokumen	138.719.900
5	02	02	1,04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	76.442.000	1 Laporan	84.086.200
5	02	02	1,04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	49.222.000	1 Laporan	54.144.200
5	02	02	1,04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	269.593.000	2 Dokumen	296.552.300

RENCANA KERJA

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	Target Kinerja	Target Capaian Kinerja APBD TA. 2022 PerKegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja	Perkiraan Maju TA. 2023 PerKegiatan/ SubKegiatan
5	02	02	1,04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000
5	02	02	1,04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	39.808.000	1 Dokumen	43.788.800
5	02	02	1,04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	283.253.000	1 Dokumen	311.578.300
5	02	02	1,04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000
5	02	02	1,04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen	38.280.000
5	02	02	1,04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	35.364.000	44 Orang	38.900.400
5	02	02	1,04	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	34.482.000	1 Dokumen	
5	02	02	1,05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Lacarnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Keuangan Daerah	100%	93.058.102.500	100%	102.363.912.750
5	02	02	1,05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	90.263.029.900	1 Laporan	99.289.332.890
5	02	02	1,05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.261.072.600	1 Laporan	2.487.179.860
5	02	02	1,05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	534.000.000	1 Laporan	587.400.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan penatausahaan BMD yang akurat dan akuntabel disampaikan tepat waktu	100%	668.598.000	100%	735.457.800
5	02	03	1,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah Yang Dikelola	100%	668.598.000	100%	735.457.800
5	02	03	1,01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	89.552.000	1 Dokumen	98.507.200
5	02	03	1,01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000
5	02	03	1,01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	19.800.000
5	02	03	1,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000
5	02	03	1,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	49.222.000	1 Laporan	54.144.200
5	02	03	1,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	229.902.000	1 Laporan	252.892.200

RENCANA KERJA

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	Target Kinerja	Target Capaian Kinerja APBD TA. 2022 PerKegiatan/ SubKegiatan	Target Kinerja	Perkiraan Maju TA. 2023 PerKegiatan/ SubKegiatan
5	02	03	1,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	47.000.000	1 Laporan	51.700.000
5	02	03	1,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	19.950.000	1 Laporan	21.945.000
5	02	03	1,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000
5	02	03	1,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000
5	02	03	1,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000
5	02	03	1,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000
5	02	03	1,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	34.972.000	44 Orang	38.469.200
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah	97.5	145.530.000	97.5	160.083.000
5	2	4	2		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD	100	145.530.000	100	160.083.000
5	2	4	2	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	27.200.000	1 Dokumen	29.920.000
5	2	4	2	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.200.000
5	2	4	2	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	14.140.000	1 Laporan	15.554.000
5	2	4	2	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Objek Pajak	23.024.000	2 Objek Pajak	25.326.400
5	2	4	2	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Kali	45.026.000	2 Kali	49.528.600
5	2	4	2	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	14.140.000	1 Dokumen	15.554.000

BAB IV
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Muna Barat dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 serta mengacu pada Renstra Perubahan BKAD Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempumaan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022 dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan kami ucapkan terma kasih kepada semua pihak yang telah membatu masukan dan dukungan sampai tersusunnya Rencana Kerja ini.

Laworo, 5 Mei 2022.

Kepala BKAD Kab. Muna Barat,



ALIMRAN, SE., MM.

Pembina Tk.I, Gol.IV/bb

NIP. 19790907 200502 1 006